KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja Legislasi masih Buram
Tanggal : Minggu, 02 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kinerja Legislasi masih Buram

Banyak rancangan undang-undang yang terganjal untuk disahkan menjadi undang-undang karena alasan teknis harmonisasi.

Fachri Audhia Hafiez
redaksi@mediaindonesia.com

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengkritisi capaian revisi serta rancangan baru undang-undang yang mestinya disahkan pada 2021. Dari 33 rancangan, DPR hanya mampu menyepakati pengesahan delapan RUU menjadi undang-undang (UU).

"Jika berkaca ke belakang, dapat dikatakan bahwa Prolegnas (Program Legislasi Nasional) masih mengalami potret buram," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif Atang Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Delapan revisi dan rancangan UU yang disahkan itu meliputi UU Kejaksaan, UU Jalan, UU Otonomi Khusus Papua, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta tiga UU mengenai pembentukan pengadilan di beberapa daerah.

Kondisi itu, kata Atang, memperlihatkan Prolegnas 2021 tidak memiliki perubahan yang signifikan secara kuantitatif dan kualitiatif. Bahkan, secara kuantitatif tidak berbeda dengan realisasi Prolegnas sebelumnya.

"Misalnya di 2015 hanya tiga UU yang disahkan, lalu 10 UU pada 2016, enam UU pada 2017, lima UU pada 2018, 14 UU pada 2019, dan tiga UU pada 2020."

Atang mengatakan seharusnya penetapan Prolegnas sebagai prioritas didasarkan pada tujuan bernegara yang secara filosofis sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Prolegnas bukan hanya keranjang sampah yang kemudian dipungut dengan dasar kesukaan lembaga pembentuk undang-undang," ujarnya.

Atang juga menyatakan kekecewaan Partai NasDem lantaran banyak RUU yang memiliki relasi kuat secara filosofis tidak ditetapkan sebagai UU. Misalnya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Hanya dengan alasan persoalan-persoalan teknis harmonisasi kemudian rancangan UU itu menjadi terabaikan," cetus Atang.

Keterbukaan anggaran

Selain kinerja legislasi, DPR juga mendapatkan kritik kurang transparan dalam penganggaran. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi menilai Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tidak memberikan akses leluasa kepada publik untuk mendapatkan informasi.

Fitra mencontohkan penggunaan dana reses anggota DPR yang tidak terpublikasi. Namun, anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan DPR menjunjung akuntabilitas, termasuk di penganggaran.

"Setiap kebijakan dilakukan pemerintah dan DPR harus bisa diakses siapa pun dan itu sudah dilakukan DPR. Itu bisa dilihat di berbagai platform yang disediakan DPR," ujar Guspardi.

Menurut dia, penggunaan anggaran termasuk dana reses wajib dilaporkan ke sekretariat DPR dan dipantau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua BURT DPR Ahmad Dimyati Natakusumah juga mengklaim pengelolaan anggaran DPR sudah baik. "Kalau ada yang kena kasus korupsi, itu kasusnya bukan itu (pengelolaan anggaran DPR)," ucapnya.

Anggota DPR dikatakan Dimyati tidak bisa memperkaya diri melalui fasilitas yang diperoleh melalui anggaran DPR. Jumlah titik kunjungan reses, misalnya, tidak sebanding dengan anggaran reses sebesar Rp140 juta seperti disebut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti. Akibatnya, anggota DPR harus menombok. (Sru/Atm/P-2)